BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan kebijakan penanganan banjir melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan agenda, perumusan, penetapan, hingga implementasi kebijakan. Implementasinya meliputi sistem peringatan dini, bantuan kebutuhan dasar, bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang, jaminan hidup, santunan keluarga korban, penyediaan hunian sementara dan hunian tetap, serta pemulihan akses dan sarana prasarana. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melakukan penanganan sejak tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan antara lain adanya koordinasi antara BPBD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan kelurahan, masyarakat, serta pihak lain yang membantu penanggulangan bencana. Adapun faktor penghambat meliputi terganggunya akses menuju lokasi terdampak, proses verifikasi dan pemutakhiran data, keterbatasan serta status lahan, dan pembangunan hunian tetap yang membutuhkan waktu.
3. Tinjauan Siyāsah Syar'iyyah terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk Kebijakan Pemerintah Kota Padang pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Siyāsah Syar'iyyah, yaitu keadilan, amanah, musyawarah, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Hal tersebut terlihat dari pemberian bantuan sesuai kondisi masyarakat,

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. pelaksanaan program penanganan dan pemulihan, keterlibatan masyarakat dalam pembahasan tertentu, upaya memenuhi kebutuhan dan keselamatan masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah sejak kesiapsiagaan sampai pemulihan. Hanya saja masih dalam tahap pelaksanaannya/ belum selesai secara tuntas, sehingga pemerintah perlu terus meningkatkan ketepatan pendataan, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan percepatan pemulihan.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Padang Pemerintah Kota Padang diharapkan meningkatkan ketepatan pendataan dan verifikasi masyarakat terdampak agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat, terutama dalam mempercepat pemulihan akses, pembangunan hunian tetap, dan sarana prasarana yang rusak akibat bencana.
2. Bagi masyarakat Lubuk Minturun dan Batu Busuk Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir. Khususnya masyarakat yang tinggal di tepi sungai atau berada di wilayah yang berisiko banjir, agar lebih waspada terhadap perubahan kondisi sungai, memperhatikan informasi dan peringatan dini dari pemerintah, serta segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman apabila terdapat tanda-tanda akan terjadi banjir. Masyarakat juga diharapkan menjaga lingkungan sekitar sungai dan tidak melakukan kegiatan yang dapat menghambat aliran air.

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Alam, M., & Pradana, A. G. (2016). *Pembelajaran penanggulangan bencana banjir di tiga daerah* (Number 8). https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/14477/MjkzMDk=/Banjir-Bengawan-Solo-tahun-1966-dampak-dan-respons-masyarakat-kota-Solo-abstrak.pdf

Alliyu, A. A. (2023). Bencana Banjir : Pengertian Penyebab, Dampak Dan Usaha Penanggulangannya Berdasarkan Uu Penataan Ruang Dan Ruu Cipta Kerja. *Researchgate*, 1–12.

Andini. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Banjir di Kota Pekanbaru*. Universitas Riau.

Arisman, L. H. (2021). Pemikiran Islam tentang hubungan agama dengan negara mengalami sebuah dinamisasi terutama pasca kebangkrutan pemerintahan khilafah Islam terakhir ; Turki Usmani . *An-Nida'*, *45*(1), 1–21. https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528

Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2026). *Kota Padang Dalam Angka 2026*. https://padangkota.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/10f4bbb5cfb5ec2bd2df44ec/kota-padang-dalam-angka-2026.html

BNPB. (2025). *Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2024*.

BNPB, P. D. I. dan H. (2017). *(Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana)*. Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.

BPBD. (2025). *Data & Informasi PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR KOTA PADANG*.

BPBD Kota padang. (2025). *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang*. (0751).

BPBD Kota padang. (2026). *BPBD Kota Padang*.

BPBD Kota padang. (2026b). *Penanganan Pasca Bencana Hidrometeorologi di Kota Padang Bantuan Jaminan Hidup*.

Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Kencana Prenada Media Group.

Dr. Fatmawati. (2015). *Fikih SIYASAH* (M. Shuhufi, Ed.). Pusaka Almaida.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.

Engkus, H Si, M. (2022). *KEBIDAKAN PUBLIK (KONSEP, FORMULASI, IMPLEMENTASI, DAN EVALUASI SERTA PERUBAHAN)*. PT KIMSHAFI

UIN IMAM BONJOL PADANG

ALUNG CIPTA Taman Cibodas Lippo Cikarang Jalan Ciliwung 1 No 1 Kabupaten Bekasi – Jawa Barat www.publisher.alungcipta.com.

Evelina, D. R., & Barus, L. S. (2023). *Perkembangan Pranata Pertanahan dalam Pengembangan Kota Baru PADANG*. *12*, 315–334. etnoreflika: Jurnal Sosial dan Budaya, Volume 12, Nomor 2, Juni 2023: 315 – 334 http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/etnoreflika

Faiza, Miftahul,Idajati, H. (2023). Identifikasi Variabel Berpengaruh pada Pengembangan Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. *Jurnal Teknik ITS*, *12*(1), D58–D63. https://doi.org/10.12962/j23373539.v12i1.111909

Fauzan. (2022). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Banjir dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Firmansyah. (2022). *Analisis Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.

Fuady Abdullah. (2022). 5377-Article Text-16810-1-10-20221214. *Jurnal El-Dusturie*, *vol.1*(2).

Hasibuan, N. A., Sudarman, S., & Hakim, L. (2023). Perkembangan Urbanisasi Kota Padang Tempo Dulu. *Jawi*, *6*(2), 110. https://doi.org/10.24042/00202361755400

Hidayat. (2019). *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Ditinjau dari Perspektif Siyāsah Syar'iyyah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hisbullah, R. B. . D. L. (2022). Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah. *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syari"ah*, *3*(2), 393–402.

Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, *1*(1), 123. https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278

IKP Diskominfo Kota Padang. (2025). *Akibat Banjir Bandang di Padang: Delapan Intake Rusak, 100.000 Pelanggan Air Minum Terdampak*. https://padang.go.id/berita/akibat-banjir-bandang-di-padang-delapan-intake-rusak-100000-pelanggan-air-minum-terdampak?utm_source

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (1st ed.). Kencana.

Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana

UIN IMAM BONJOL PADANG

Prenadamedia Group.

James E. Anderson. (2014). *Public Policymaking* (8th, direvis ed.). Cengage Learning.

Kementrian Sosial. (2025). *Kementerian Sosial Gelontorkan Bantuan Pascabencana*. https://padang.go.id/berita/kementerian-sosial-gelontorkan-bantuan-pascabencana-apa-itu

Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata Ruang Air*. Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=v_NmfqwW4eQC

Lutfiana. (2020). *Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.

MAS MERA1, MUHAMMAD GIVI1, FEBRUARMAN, AGRA DAULAY, F. G. (2021). INVESTIGASI BANJIR PADA PERUMAHAN SAFA. *JURNAL REKAYASA SIPIL (JRS-UNAND)*, *17*(2), 176–185.

Maulana. (2019). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Banjir di Kota Medan.* Universitas Sumatera Utara.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan I). Mataram University Press.

Muhammad Dadang Alpino , Jhon Kenedi, I. J. (2024). Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah Muhammad. *QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN*, 296–311. https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index%0A

Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan* (5th ed.). PT Elex Media Komputindo.

Nurjanah, Sugiharto, R., , Kuswanda, D., BP, S., & Adikoesoemo. (2013). *Manajemen Bencana* (2nd ed.). Alfabeta.

Pemerintah Kota Padang. (2025). *Jalan Amblas Akibat Banjir, Akses ke Batu Busuk Putus*. https://padang.go.id/berita/jalan-amblas-akibat-banjir-akses-ke-batu-busuk-putus

Pemerintah Kota Padang. (2026). *Sekilas Kota Padang*. https://padang.go.id/arsip/103

Pendidikan, K., & Kebudayaan, D. A. N. (2001). Naskah akademik Rancangan

Peraturan Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Management*, (2), 2001–2001.

Prasetyo. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Surakarta*. Universitas Surakarta.

Pratama. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung*. Universitas Padjadjaran.

Pusat Data Informasi dan Humas BNPB. (2017). Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana. In *European Centre for Disease Prevention and Control*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2011. https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf.

Ramli, S. (2010). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)* (Cetakan Pe). Dian Rakyat.

Republik Indonesia. (2014). UU NOMOR 23 TAHUN 2014. In *Sekretariat Negara Republik Indonesia*.

Safwan, M., Taher, I., Asnan, G., & Syafrizal. (1987). *Sejarah kota padang*. 157. https://books.google.co.id/books/about/Sejarah_Kota_Padang.html?id=MZuKCgAAQBAJ&redir_esc=y

Saim Kayadibi. (2015). The Theory of Syarî'ah Oriented Public Policy. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *15*(2), 171–180. https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2861

Saputra. (2021). *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Banjir di Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.

Sari. (2020). *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang.

Sasmita, F. S., & Pratiwi, V. (2024). Identifikasi Penyebab Banjir di Kawasan Cicaheum Kota Bandung - Jawa Barat. *CRANE: Civil Engineering Research Journal*, *5*(1), 63–69. https://doi.org/10.34010/crane.v5i1.10184

Seyhan, E. (1990). *Dasar-Dasar Hidrologi* (Soenardi Prawirohatmodjo, Ed.). Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Umar, H. (2008). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi kedu). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.

Undang-Undang No 24, Undang (2007).

UU NO 24 TAHUN. (2007). *UU NO 24 TAHUN 2007*. *46*(3), 171–174. https://doi.org/10.2320/materia.46.171

Wahijul Kadri, N. H. T. (2022). SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH Wahijul. *Jurnal Hukum Tata Negara*, *5,Edisi ll*(8.5.2017), 2003–2005. www.ejournal.an-nadwah.ac.id

Wali Kota Padang. (2026). *Keputusan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Lokasi Tanah Hunian Tetap untuk Korban Bencana Alam Banjir dan Longsor Kota Padang*.

Zainuri, D. N. (2019). Dian NOVITA& Zainuri,2019. *Jurnal Yustitia*, *20*(1). https://doi.org/10.53712/yustitia.v20i1.566

UIN IMAM BONJOL
PADANG